

ABSTRAK

EVALUASI PENDIDIKAN POLITIK KPPI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

NADIYAH INDRIYANI

Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia, khususnya di lembaga legislatif, masih tergolong rendah dan belum mencapai target kuota 30% yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan data tahun 2023, keterwakilan perempuan Indonesia berada pada angka 21,6% dan Provinsi Lampung hanya mencapai 18,82%, menempatkannya di urutan ke-19 secara nasional. Rendahnya angka ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain stereotip bahwa politik adalah ranah laki-laki, rendahnya tingkat pendidikan politik perempuan, minimnya dukungan partai politik, serta penempatan calon legislatif perempuan yang cenderung hanya untuk memenuhi kuota. Akibatnya, aspirasi dan kepentingan perempuan belum terakomodasi secara optimal dalam kebijakan publik. Pendidikan politik menjadi strategi kunci untuk mengatasi permasalahan ini. Melalui pendidikan politik yang efektif, perempuan dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan politik oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung menggunakan teori evaluasi William Dunn, yang mencakup dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan politik KPPI menjadi salah satu faktor dalam peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kepercayaan diri perempuan dalam berpartisipasi politik, namun pelaksanaannya masih cenderung bersifat periodik, terutama menjelang pemilu, dan belum menjangkau secara merata seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Pendidikan Politik, Partisipasi Politik Perempuan, Keterwakilan Perempuan.

ABSTRACT

EVALUATION OF THE KPPI'S POLITICAL EDUCATION IN INCREASING WOMEN'S PARTICIPATION IN LAMPUNG PROVINCE

By

NADIYAH INDRIYANI

Women's political representation in Indonesia, particularly within legislative bodies, remains relatively low and has yet to reach the 30% quota mandated by Law No. 7 of 2017 on General Elections. According to 2023 data, women's representation in Indonesia stands at 21.6%, while Lampung Province records only 18.82%, ranking 19th nationally. This low percentage is attributable to several factors, including the stereotype that politics is a male domain, the generally lower educational attainment among women, the limited support from political parties, and the tendency to nominate female legislative candidates merely to fulfill the quota requirement. As a result, women's aspirations and interests are not yet optimally accommodated in public policy. Political education serves as a key strategy to address this issue. Through effective political education, women can acquire the knowledge, skills, and confidence necessary to participate actively in political processes. This study aims to evaluate the implementation of political education by the Women's Political Caucus of Indonesia of Lampung Province, using William Dunn's evaluation framework, which includes the dimension of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The research adopts a qualitative descriptive method, employing interviews and documentation. The findings indicate that KPPI's political education programs has contributed on improving women's knowledge, awareness, and confidence in political participation. However, their implementation remains largely periodic particularly in the lead-up to elections and has yet to reach all segments of society equally.

Keywords: *Political Education, Women's Political Participation, Women Representation.*